



Kebut Pemenuhan RTH

Anggaran Dipangkas, Tetap Bangun Puluhan Taman

POLEMIK anggaran DKI 2015 berakhir dengan diberlakukannya penggunaan pagu anggaran 2014. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jakarta Heru Budihartono memastikan, terjadi pemangkasan anggaran belanja sebesar Rp 3,8 triliun.

Salah satunya berdampak terhadap program pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik berfungsi sebagai taman interaksi maupun lahan resapan air.

Meski demikian, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Nandar Sunandar mengklaim, pemangkasan anggaran tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dalam membangun dan memperbaiki taman di tahun 2015 ■

"Tidak, keputusan itu tidak mengganggu," ungkap dia kepada INDOPOS, kemarin (29/3).

Terbukti, Pemprov DKI telah meresmikan pembangunan Taman Pintar di Jakarta Timur pada awal Januari 2015. Artinya, pembangunan di Jakarta terus berlanjut. Terdapat juga peningkatan taman di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan yang akan dibangun sebagai destinasi wisata dan pembinaan pelajar Pramuka di Jakarta.

Dengan kata lain, pemenuhan target 30 persen RTH terus dilaksanakan. Termasuk mendukung program Jakarta sebagai Kota Layak Anak. "Ke-39 taman baru yang bakal dibangun itu pun belanja lahannya sudah tahun lalu," beber Nandar.

Hingga kini, Jakarta masih minim dengan taman interaksi publik. Tragedi maut di dalam mobil rongsokan yang menewaskan tiga bocah di wilayah RT 07/016, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi contoh bahwa ruang interaksi bagi anak-anak belum memadai.

Sebagian besar masyarakat di pemukiman padat mengidamkan taman bermain anak. "Sebenarnya program pembangunan taman di bawah kolong fly over wilayah Penjaringan itu sudah kami gencarkan sejak 2007 lalu. Pasti tahun ini

juga kita tingkatkan," kata mantan kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Utara itu.

Kesulitan utama dari penambahan taman di Jakarta yakni persoalan pembebasan lahan. Karenanya, peran serta perusahaan swasta maupun independen harus dikedepankan untuk ikut peduli terhadap pertumbuhan RTH di Jakarta.

Selain itu, keberadaan taman yang ada saat ini juga harus dipelihara oleh masyarakat. Minimal dengan cara menerapkan Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

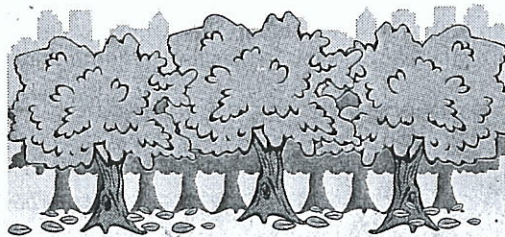
"Jangan malah taman yang ada tidak dijaga, dan ruang terbuka hijau dialih fungsikan. Kalau memang ada pelanggaran seperti itu, sikat habis. Peran masyarakat ini jelas lebih efektif," tegas Nandar.

Menanggapi hal itu, Pengamat Perkotaan Nirwono Yoga sepakat jika masalah penambahan

RTH terkendala pembebasan lahan. Sayangnya, pembebasan lahan oleh pemerintah dilaksanakan pada area yang jauh dari pemukiman. "Jelas tidak produktif, karena yang membutuhkan ruang interkasi publik itu masyarakat. Tidak mungkin dikunjungi kalau tempatnya jauh," kata dia.

Ia pun menyarankan, setiap RT, RW, lurah dan camat tidak perlu sungkan mengajukan usulan lahan di lingkungan masing-masing untuk dijadikan taman bermain. "Dananya juga kan tidak harus dari APBD, bisa juga pemerintah memberdayakan bantuan CSR untuk taman bermain di pemukiman ini," tukas Nirwono. (asp)

Pemenuhan RTH di Ibukota DKI Jakarta (Target 30 % dari total luas wilayah)



- Terkendala pembebasan lahan
- Terkendala penyediaan anggaran
 - Usulan dalam anggaran 2015 terpangkas
 - Berharap bantuan swasta melalui CSR
- Alokasi anggaran di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta
 - Total anggaran Rp 2,4 T
 - Dialokasikan untuk taman sebesar Rp 56 M
 - Rencana bangun 39 taman dan perbaiki 6 taman besar

ANGGA/INDOPOS